

Dinkes DKI Imbau Warga Lengkapi Vaksin Covid-19 dan Lakukan Prokes

JAKARTA (IM) - Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama mengimbau masyarakat melengkapi vaksinasi covid-19, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini disampaikannya seiring terjadinya kenaikan kasus covid-19 di DKI.

Menurut Ngabila, ditemukan 80 kasus baru covid-19 bergejala ringan dan tanpa gejala di Jakarta dalam sehari. Meski begitu, masyarakat tidak perlu khawatir. Namun, untuk kelompok rentan yang berisiko tinggi perlu melengkapi vaksinasi covid-19 agar terhindar dari risiko kematian.

“Melengkapi vaksinasi empat kali untuk usia 18 tahun ke atas gratis di layanan vaksinasi. Terutama kelompok berisiko terjadi keparahan yakni usia lebih dari 50 tahun, orang dengan komorbid hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, TBC, HIV, gangguan imunitas lainnya,” ungkap Ngabila, Minggu (10/12).

Sementara itu, untuk mencegah sakit, ia mengingatkan masyarakat agar

menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker terutama bila sedang sakit. Dinkes DKI, sesuai dengan Permenkes No. 23 tahun 2023 yang terbit 1 Agustus 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Covid-19, tetap melakukan tes PCR secara gratis bagi yang bergejala dan penelusuran kontak erat.

“Semua pasien positif covid-19, baik antigen/PCR, berhak melakukan isolasi mandiri di rumah selama 3-5 hari di rumah,” jelasnya.

Untuk kontak erat yang bergejala wajib dilakukan pemeriksaan swab antigen dan/atau PCR, sedangkan kontak erat yang tidak bergejala tetap dilakukan pemantauan mandiri tiga hari serta tidak diwajibkan isolasi. Tapi diimbau menggunakan masker saat aktivitas.

Pengobatan covid-19 ditanggung melalui mekanisme BPJS ke Puskesmas dan RS, serta dibiayai secara mandiri oleh masyarakat, atau dibiayai oleh penjamin lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● yan

KPU DKI Gelar Sosialisasi Pemilu 2024, Targetkan Partisipasi Pemilih 80 Persen

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi Pemilu 2024 di tengah pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin, Minggu (10/12).

Komisier KPU Jakarta Pusat, Wahyu Dinata mengatakan sosialisasi KPU DKI di CFD sudah dimulai sejak 3 pekan lalu dan akan terus konsisten hingga menjelang pemilu Februari 2024. “Untuk mengajak masyarakat dan meningkatkan partisipasi,” katanya.

Acara sosialisasi ini, kata Wahyu Dinata, mendapat dana langsung dari Pemprov DKI.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakrie berharap partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Ibu Kota meningkat. “Kami berharap 80 persen, lah, dari DKI. Dulu (pemilu) 2019 itu 79 persen,” katanya.

Acara sosialisasi ini dimulai sejak pukul 07.00 WIB dan berlangsung meriah. Sosialisasi Pemilu 2024 dilengkapi dengan kegiatan senam bersama dan dihadiri dua maskot KPU, Sura (suara rakyat) dan Sulu (suara pemilu). Keduanya mengenakan kostum badut untuk menggaet perhatian para peserta CFD agar mau

tahu lebih lanjut mengenai pemilu 2024.

Wahyu Dinata menuturkan pihaknya juga membuka posko layanan pindah pilih bagi warga Jakarta yang ingin berganti lokasi TPS. Syarat untuk mengurus pindah pilih cukup mudah, yaitu cukup membawa KTP, bukti daftar, dan bukti pendukung bahwa harus pindah pilih.

Pasangan suami istri, Arjaya, 34 tahun, dan Watini, 32 tahun, menjadi salah dua warga yang mengurus pindah pilih dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan.

“Tadi sempat tanya dulu apa saja persyaratannya, ternyata cuma tinggal tambahkan surat dari kantor aja,” kata Arjaya saat ditemui di acara sosialisasi KPU DKI.

Arjaya beserta isterinya memilih untuk menyerahkan hak suaranya di Jakarta Selatan karena dekat dengan rumah. “Karena kerja di Jakarta Selatan, biar dekat aja dari kantor,” katanya.

Anditia Ari Wibowo, sebagai operator di posko KPU DKI, menyatakan adanya kuota untuk para pemilih pindahan, yaitu hanya sebesar 2 persen dari jumlah kegiatan senam bersama dan dihadiri dua maskot KPU, Sura (suara rakyat) dan Sulu (suara pemilu). Keduanya mengenakan kostum badut untuk menggaet perhatian para peserta CFD agar mau

“Nanti kalau enggak dapat kami langsung geser ke TPS lain, tapi masih di kelurahan yang sama,” ucap Ari. ● yan

Sarat Kepentingan Politik, Sutiyoso Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso merepons klausul soal gubernur ditunjuk presiden yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Dia tak setuju dengan rencana presiden yang akan menunjuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta setelah Ibu Kota Negara pindah ke IKN Nusantara.

“Enggak setuju. Itu namanya diajak kembali ke zaman orde lama,” katanya, Minggu (10/12).

Sebelumnya, DPR RI menyetujui RUU DKJ menjadi RUU usulan inisiatif pada Selasa, 5 Desember 2023. Dalam Pasal 10 RUU DKJ tertera bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta nantinya dipimpin gubernur yang dibantu wakil gubernur. Kepala daerah DKJ ini ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden

dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

Sutiyoso menilai pasal ini bentuk dari kemunduran demokrasi. Sebab, pemilihan kepala daerah Jakarta selalu melibatkan partisipasi masyarakat sejak 2007.

Menurut dia, bukan zamannya lagi untuk menerapkan sistem pemilihan kepala daerah tanpa melibatkan masyarakat. “Dipilih oleh DPRD sudah lewat. Libatkan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun menilai ada potensi bahaya jika gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih presiden. Kepentingan politik, lanjut Sutiyoso, tak bisa dihindarkan dalam penetapan calon kepala daerah.

“Enggak bisa dihindarkan, kepentingan politik akan masuk di dalamnya,” ucap mantan Gubernur DKI dua periode ini. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



PEMANFAATAN LIMBAH KAYU

MENJADI FURNITUR

Petugas menyelesaikan pembuatan furnitur dari limbah kayu di Posko UPS Badan Air Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (10/12). UPS Badan Air Kecamatan Pasar Minggu memanfaatkan limbah kayu dari Sungai Ciliwung tersebut menjadi furnitur yang memiliki nilai jual.

Berobat Gratis Cukup Pakai KTP Depok Cuma Isapan Jempol

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menguji pernyataan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat dia berobat ke RS Hermina. Dia menyampaikan ke manajemen RS jika dirinya mau bayar pakai KTP sesuai dengan yang disampaikan wakil wali kota sebelumnya, dan ternyata dia ditolak berobat menggunakan KTP.

DEPOK (IM) - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyebut per 1 Desember 2023 kotanya sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Tiap warga yang ingin berobat ke puskesmas atau rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, tak perlu bayar.

Namun, anggota Fraksi PDIP DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo, membantahnya. Menurut dia, ucapan Imam tidak sesuai fakta di lapangan bahwa warga masih harus membayar ketika berobat di rumah sakit.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini menguji pernyataan Imam itu saat dia berobat ke RS Hermina. Dia menyam-

paikan ke manajemen RS jika dirinya mau bayar pakai KTP.

“Sesuai dengan yang waktu itu disampaikan wakil wali kota, ternyata ditolak KTP saya. Padahal KTP saya KTP Depok,” kata Hendrik, Minggu (10/12).

Ia menilai Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono berbohong. Pernyataan dari dinas kesehatan atas ucapan Imam di media cetak, online, maupun YouTube ternyata tidak seindah yang disampaikan.

“Banyak hal berbelit yang menjadi persyaratan penggunaan KTP untuk berobat,” tutur Hendrik

Bukan hanya dirinya, ia menyebut ada warga yang

berobat ke puskesmas pada Jumat, 7 Desember 2023 masih dipungut bayaran Rp10 ribu dan tidak bisa hanya menggunakan KTP.

“Saran saya ke Pak IBH, ya, sudahlah berhenti membohongi rakyat dengan janji manis yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa dinikmati rakyat,” ucap dia.

Dia meminta Imam, yang juga menjabat Ketua DPD PKS Depok, agar tidak menjadikan isu kesehatan untuk ajang kampanye. Ia menuding Imam tidak menyosialisasikan prosedurnya yang berbelit-belit.

Sementara itu, ormas Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok juga menguji kebenaran pernyataan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono soal berobat gratis cukup pakai KTP. Ketua DKR Roy Pangharapan mengujinya dengan membawa pasien miskin ke Puskesmas di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji.

“Ternyata tidak terbukti. Pernyataan Wakil Wali Kota itu isapan jempol doang. Pasien tetap diminta bayar. Padahal pasien miskin. Ini pembohongan publik,” kata

Roy.

Ia menceritakan pada Sabtu, 9 Desember 2023 DKR Kota Depok mendapat laporan warga Depok yang anaknya berobat ke Puskesmas Kemiri Muka, Beji Depok, dengan menggunakan KIS-PBI yang nonaktif sehingga tetap disuruh membayar.

“Orang tua pasien menunjukkan kepada petugas pernyataan Wakil Wali Kota yang mengatakan cukup pakai KTP dan gratis, tapi petugas puskesmas tetap minta bayaran,” ujar Roy.

Roy pun mendatangi puskesmas itu dan mendapat penjelasan jika pernyataan wakil wali kota sudah diralat. Berobat gratis cukup pakai KTP belum bisa dilaksanakan pada Desember 2023.

“Artinya pasien tetap disuruh bayar umum. Belum ada arahan jika bisa berobat gratis di puskesmas hanya cukup pakai KTP Depok,” ucap politikus Partai NasDem itu mengutip penjelasan petugas puskesmas.

Ia pun mendesak Pemkot Depok memberikan klarifikasi dan penjelasan soal program berobat gratis cukup

pakai KTP itu.

Keluarkan SE

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Surat Edaran (SE) tentang implementasi Universal Health Coverage (UHC), jaminan kesehatan nasional di Kota Depok, yang cukup menyertakan kartu tanda penduduk atau KTP untuk mengakses pengobatan gratis.

SE dengan nomor 003/9173 - Dinkes tersebut ditandatangani secara elektronik Wali Kota Depok Mohammad Idris pada Jumat (8/12).

Surat edaran tersebut menjelaskan tentang Kota Depok yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Desember 2023. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada skema jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok.

Idris menyampaikan bagi warga Depok yang sedang sakit cukup menunjukkan KTP dan KK. Pihak rumah sakit lalu lapor ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan rawat. ● yan

BPN Bersama Kejari Kota Depok Perkuat Sinergi Berantas Korupsi

FOTO: BPN KOTA DEPOK

DEPOK (IM) - Menerapkan prinsip-prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, dan terus menjaga integritas dalam semua aspek, menjadi komitmen penting dalam kolaborasi yang dibangun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan semangat kuat yang terus dibangun antara Kantor Pertanahan Kota Depok dengan Kejari bukan hanya sebatas tagline atau slogan tapi harus dibuktikan dengan prestasi kerja nyata dalam hal pelayanan untuk kepentingan publik.

“Kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aspek operasional kami. Kita jaga marwah BPN ini dengan terus meningkatkan sinergi dengan Kejari,” ujar Indra Gunawan saat menerima kunjungan kerja Kajari Kota Depok, Silvia Desty Rosalina dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, Jumat (8/12) lalu.

“Hari Anti Korupsi adalah pengingat bagi kami semua untuk terus berjuang melawan korupsi dan meningkatkan kinerja kami. Sekali lagi, ini jangan dijadikan tagline, tapi komitmen dalam bersinergi yang harus terus kita bangun dan wujudkan,” tegas Indra Gunawan.

Indra Gunawan memberikan acungan jempol kepada Kejari Kota Depok, Silvia Desty Rosalina yang mengambil langkah proaktif untuk memanfaatkan momentum



Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menerima kunjungan kerja Kajari Kota Depok Silvia Desty Rosalina dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, Jumat, 8 Desember 2023.

ini sebagai sarana kolaborasi untuk meningkatkan kinerja dan transparansi di lembaganya.

“Terima kasih atas kunjungan jajaran Kajari Kota Depok. Terima kasih pula kami sampaikan, ini jalan pengingat kita bersama menjaga integritas dan profesional sebagai ruang kendali menghindari sifat dan kerja koruptif,” ujar Indra Gunawan seraya menunjukkan aktivitas pelayanan BPN Kota Depok.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan profesional, sambung Indra, BPN Kota Depok telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

“Ini termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan dan penyelesaian

sertifikat tanah, serta pelatihan berkelanjutan untuk staf tentang etika kerja dan pencegahan korupsi,” jelas Indra.

Selain itu, BPN Kota Depok juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk mempromosikan budaya anti korupsi.

Hal ini sejalan dengan misi pemerintah meningkatkan Indonesia Maju dari sektor pertanahan dan mencegah keberadaan mafia tanah yang masih menjadi momok masyarakat.

“Kami percaya bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan,” jelasnya.

Dalam kesempatan kunjungan kerjanya, Silvia Desty Rosalina tanpa sungkan menyapa warga yang hadir di ruang pelayanan BPN Kota Depok.

Silvia mengambil langkah proaktif dalam memerangi korupsi. Dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya korupsi di BPN Kota Depok.

Ini sebagai ruang dan kolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan dan ekonomi suatu negara.

Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya

berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, Silvia Desty Rosalina juga menyapa masyarakat saat pelayanan *one day service*. Ini adalah cara yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang dan menyebarkan pesan anti-korupsi kepada masyarakat luas.

“Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kejari Kota Depok dapat memastikan bahwa pesan anti-korupsi didengar dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Silvia.

“Hari ini saya bahagia sekali bisa berkolaborasi dengan BPN Kota Depok yang ikut berperan aktif dalam memerangi korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua,” pungkas Silvia Desty Rosalina. ● ber